

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN APARATUR NEGARA YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR GUNA MENCIPTAKAN *GOOD GOVERNANCE*

Oleh : Zahratil Jannah Rafika Putri

Dosen Pembimbing Utama : Yayuk Sugiarti, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing Pendamping : Absoril Fitrhry, S.H., M.H.

Pungli seringkali dilakukan oleh aparatur negara bahkan pejabat pemerintahan. Pungli yang dilakukan oknum aparatur negara dalam pelayanan publik guna menciptakan *good governance*, dapat mencerminkan bahwa sumber daya manusia, para pegawai pemerintahan melakukan tindak pidana demi keuntungan pribadi. Kenyataannya oknum aparatur negara membantu masyarakat dalam pelayanan publik dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri melalui pungli tersebut.

Perumusan masalah dari skripsi ini adalah Bagaimana urgensi perlunya kepastian hukum dalam penegakan pungutan liar yang dilakukan oleh aparatur negara dan Bagaimana pertanggungjawaban hukum aparatur negara yang melakukan pungutan liar. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui dan mendapatkan solusi dari rumusan masalah tersebut.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan beberapa sumber bahan hukum primer dan sekunder, serta penelusuran bahan hukum melalui perundang-undangan dan literatur lainnya.

Urgensi perlindungan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dapat meningkatkan penegakan dan penerapan hukum harus dilaksanakan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya guna menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat atau korban pungli sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satunya hukum administrasi sendiri dapat menjadi langkah preventif dan langkah represif dalam tindak pidana pungli yang dilakukan oleh aparatur negara.

Dibutuhkannya pengaturan yang lebih jelas terkait pungli. Penerapan pasal pidana dalam penegakan hukum terhadap praktik pungli menjadi penting dan perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum. Diperlukan sosialisasi yang berkaitan dengan kesadaran hukum kepada para pegawai pelayanan publik. Kemudian, diperlukannya pengawasan yang lebih intens oleh Saber Pungli.

Kata Kunci : Aparatur Negara, Pungutan Liar, *Good Governance*.

ABSTRACT

ACCOUNTABILITY OF STATE APPARATUS THAT CONDUCT EXPOSITION TO CREATE GOOD GOVERNANCE

By : Zahratil Jannah Rafika Putri
Main Supervisor : Yayuk Sugiarti, S.H., M.H.
Assistant Supervisor : Absoril Fitrhry, S.H., M.H.

Extortion is often carried out by state apparatus and even government officials. Extortion committed by unscrupulous state apparatus in public services in order to create good governance, can reflect that human resources, government employees commit criminal acts for personal gain. In fact unscrupulous state apparatus helps people in public services with the aim of enriching themselves through extortion.

The formulation of the problem in this thesis is how urgent is the need for legal certainty in enforcing illegal levies carried out by state apparatus and what is the legal accountability of state apparatus who carry out illegal levies. The purpose of writing this thesis is to find out and get a solution from the formulation of the problem.

The research method in writing this thesis is normative by using a statutory approach with several sources of primary and secondary legal materials, as well as tracing legal materials through legislation and other literature.

The urgency of protection, legal certainty and justice for the community can improve enforcement and application of the law must be carried out by the government as well as possible in order to create legal certainty for the community or victims of extortion in accordance with applicable regulations. One of them is that administrative law itself can be a preventive and repressive step in extortion crimes committed by state apparatus.

There is a need for clearer regulation regarding extortion. The application of criminal articles in law enforcement against extortion practices is important and needs serious attention from law enforcement officials. Socialization related to legal awareness is needed for public service employees. Then, more intense supervision is needed by Saber Extortion.

Keywords: *State Apparatus, Illegal Fees, Good Governance.*